

## Efektivitas Program Pemutakhiran Data Kependudukan Dalam Pelayanan Penerbitan NIK di Kecamatan Sebatik Tengah

Hasnah<sup>1</sup>, Dandan Haryono<sup>2</sup>, Agus Priyanto<sup>3</sup>

Universitas Terbuka<sup>1,2,3</sup>

anahattagriselda@gmail.com<sup>1</sup>, dandanharyono@gmail.com<sup>2</sup>,

guspri@ecampus.ut.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to describe and analyze the extent to which the issuance of NIK (National Identification Number) services through population data updates in Central Sebatik District, Nunukan Regency, as well as the supporting and inhibiting factors in the implementation of this program. This research employs a descriptive qualitative research design (positivism) with a quasi-qualitative format. The quasi-qualitative format was chosen due to the relatively short time frame in which the research was conducted, resulting in the collection of simple qualitative data, which was then analyzed descriptively to obtain answers to the research questions. In the data collection process, this research uses interview methods and literature/documentary studies to provide an overview of the implementation of NIK issuance services through population data update programs, particularly for residents aged 5 years and 3 months and above. This study uses the effectiveness theory proposed by Budiani to measure the effectiveness of this program using four dimensions: target accuracy, socialization, goal achievement, and program monitoring. The results of this study indicate that the implementation of NIK issuance services through population data updates for residents aged 5 years and 3 months and above is still not effective. This conclusion is based on an analysis through the effectiveness dimensions, which did not meet the expected results. The dimension of target accuracy of this program has been very good in reaching all villages in the Central Sebatik District area, but the other three dimensions are still not optimal. This is influenced by several supporting and inhibiting factors in the implementation of the program. Supporting factors include the delegation of authority from the Regent to the Sub-District Head and excellent collaboration among stakeholders in the Central Sebatik District area in overcoming emerging obstacles. Inhibiting factors include limited sub-district budget, inadequate quality and quantity of human resources in both sub-district and village governments, and the presence of residents who do not have basic documents proving their Indonesian citizenship.*

**Keywords:** Effectiveness, Target Accuracy, Socialization, Goal Achievement, Program Monitoring

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif (positivisme) dengan format quasi-qualitative (kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu). Pemilihan format quasi-qualitative dalam penelitian ini dikarenakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga data-data yang

dikumpulkan berupa data kualitatif sederhana yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi Pustaka/dokumenter sehingga didapatkan gambaran terkait pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan khususnya bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan ke atas. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani untuk mengukur sejauh mana efektivitas program ini dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu ketaatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan ke atas masih belum efektif. Hal ini didasarkan pada hasil analisis melalui dimensi efektivitas yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dimensi ketepatan sasaran program ini sudah sangat baik menjangkau seluruh Desa yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah namun pada ketiga dimensi lainnya masih belum maksimal. Hal ini turut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program. Faktor pendorong berupa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dan kolaborasi antar *stakeholder* yang ada di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah yang sangat baik dalam mengatasi kendala yang muncul. Sedangkan faktor penghambat terdiri atas minimnya anggaran kecamatan, kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang baik di pemerintah kecamatan maupun desa serta masih adanya Masyarakat yang tidak memiliki dokumen dasar yang dapat membuktikan bahwa warga yang bersangkutan merupakan WNI.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Ketepatan Sasaran, Sosialisasi, Pencapaian Tujuan, Pemantauan Program

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat pusat namun oleh semua tingkatan pemerintahan termasuk Bupati selaku penguasa elite pemerintah daerah tingkat kabupaten bahkan termasuk masyarakat sebagai sasaran pelayanan. Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan rumah tangganya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh unsur penunjang yaitu perangkat daerah. Irfan (2020:21) menjelaskan bahwa pembentukan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah.

Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan didefinisikan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat yang menjalankan fungsi pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Kecamatan selain melaksanakan penyelenggaraan publik secara langsung, juga diberikan tugas khusus untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa yang berada dalam lingkup wilayahnya. Salah satu pelayanan dasar yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kabupaten Nunukan adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku penanggung jawab teknis telah melakukan beberapa kali program pemutakhiran data kependudukan dalam rangka pelayanan penerbitan NIK di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan namun masih terdapat banyak permohonan penerbitan NIK oleh penduduk yang mengaku sebagai WNI. Berdasarkan data pelayanan penerbitan NIK di Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2022, sebanyak 97 permohonan penerbitan NIK yang diajukan oleh masyarakat yang berusia di atas 5 (lima) tahun. Permohonan ini lebih banyak diajukan oleh warga eks TKI yang bekerja di Sabah, Malaysia dengan berdasarkan pada beberapa bukti kewarganegaraan seperti KTP kuning, KK lama, paspor, surat keterangan nikah, surat keterangan lahir maupun ijazah atau surat keterangan sekolah bahkan pengajuan dari warga yang tidak memiliki dasar/bukti kewarganegaraan sama sekali.

NIK merupakan nomor identitas tunggal bagi WNI sebagai persyaratan paling dasar dalam pelayanan administrasi kependudukan yang lain seperti KTP, KK dan Akta. Masyarakat bahkan tidak dapat mengakses pelayanan publik lainnya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan jika tidak memiliki dokumen kependudukan. Penduduk yang tidak memiliki NIK namun telah berdomisili di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah saat ini sering menimbulkan problematika sosial lainnya khususnya dalam bidang pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui pemutakhiran data penduduk khususnya dalam di wilayah perbatasan bagi masyarakat perbatasan yang telah berumur 5 tahun 3 bulan ke atas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana efektivitas pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Efektivitas program dapat diukur dengan menggunakan indikator penilaian program. Budiani (2007:53) mengungkapkan bahwa untuk efektivitas suatu program dapat diukur dengan menggunakan beberapa dimensi yaitu: Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, Pemantauan program

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait sejauh mana efektivitas pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran terkait sejauh mana efektivitas pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah. Pemilihan

format quasi-qualitative dalam penelitian ini dikarenakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga data-data yang dikumpulkan berupa data kualitatif sederhana yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Soekanto adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui penggambaran terhadap kondisi suatu objek panel (masyarakat, individu dan sebagainya) kemudian saat ini didasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagai objek<sup>1</sup>. Sedangkan quasi-qualitative menurut Bungin, 2007:71 bertujuan untuk meringkaskan berbagai kondisi atau situasi dan menggambarkan realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu dalam bentuk data kualitatif sederhana yang dapat dianalisis secara deskriptif<sup>2</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe quasi-qualitative sesuai dengan gambaran masalah dan penggunaan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif melalui format quasi-qualitative menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada strategi analisis data quasi-qualitative. Dalam melakukan analisis data, penulis mengacu pada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2017:132-137) yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan dalam analisis data kualitatif dalam penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga peneliti menemukan datanya jenuh dan dilakukan secara interaktif. Kegiatan analisis data tersebut meliputi beberapa tahapan yakni, pengumpulan data (*data collecting*), kondensasi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing*)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kecamatan Sebatik Tengah sebagian besar merupakan pendatang dari luar daerah dan eks TKI yang berasal dari wilayah Sulawesi, Jawa dan Nusa Tenggara Timur yang memilih untuk menetap di Pulau Sebatik. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya kebijakan transmigrasi ke wilayah Kalimantan dan letak kecamatan sebagai daerah perbatasan yang dilalui oleh warga Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Malaysia menjadi pilihan untuk menetap setelah kembali ke tanah air.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 1999. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press hal. 23

<sup>2</sup> Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Ketiga Cetak Ke-10). Jakarta. Kecana hlm:71

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kec. Sebatik Tengah**

DESA	PENDUDUK			RUMAH TANGGA (KK)	JUMLAH PENDUDUK PER KM <sup>2</sup>
	Lk	Pr	JUMLAH		
Sei Limau	1.527	1.409	2.936	841	611,28
Aji Kuning	1.774	1.638	3.412	868	220,07
Maspul	472	442	914	262	48,53
Bukit Harapan	651	594	1.245	347	188,37
<b>Total</b>	<b>4.424</b>	<b>4.083</b>	<b>8.507</b>	<b>2.318</b>	<b>178,31</b>

Sumber : Profil Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2023

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Tengah saat ini adalah sebanyak 8.507 orang dengan jumlah KK sebanyak 2.318. Sebagian besar penduduk adalah transmigran dan mantan TKI sehingga menyebabkan jumlah persebaran penduduk tidak merata. Pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan dilakukan di seluruh wilayah desa dalam rangka peningkatan kepemilikan identitas bagi penduduk di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

Pelayanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 huruf g Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Bupati diberi kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Adminduk berskala Kabupaten. Selain itu, dalam Pasal 13 yang mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi kewajiban setiap warga negara untuk mengurus kepemilikan identitas sebagai Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan wawancara, diperoleh gambaran terkait Pelayanan Penerbitan NIK bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan ke atas di Kecamatan Sebatik Tengah. Gambaran pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Kantor Camat Sebatik Tengah melalui operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Sebatik Tengah, didapatkan data pengusulan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan sebagai berikut:

**Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Penerbitan NIK Program Pemutakhiran Data Kependudukan Kecamatan Sebatik Tengah**

TAHUN	JUMLAH DASAR	KETERANGAN
-------	--------------	------------

		KTP KUNING/KK PINK	
		SKPD	
		PASPOR	
2014	76	BUKU NIKAH	
		KETERANGAN	
		KELAHIRAN	
		IJAZAH	
	69	TANPA DASAR	DITERUSKAN
Jumlah		145	KE
		KTP KUNING/KK PINK	DISDUKCAPIL
		SKPD	KAB. NUNUKAN
		PASPOR	
2018	198	BUKU NIKAH	
		KETERANGAN	
		KELAHIRAN	
		IJAZAH	
	53	TANPA DASAR	
Jumlah		251	
Total	396	WARGA	

Sumber: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Kependudukan Kecamatan Sebatik  
Tengah Tahun 2014 dan 2018

Berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir (tahun 2022 dan 2023) masih terdapat permohonan penerbitan NIK di Kecamatan Sebatik Tengah bagi warga yang telah berusia diatas 5 tahun yang diusulkan oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan yang telah dilaksanakan oleh pihak Kecamatan masih belum mengakomodir seluruh warga yang telah berusia diatas 5 tahun yang belum memiliki NIK. Data tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Jumlah Permohonan Penerbitan NIK bagi Warga yang Berusia 5 Tahun 3 bulan Keatas**

TAHUN	JUMLAH	DASAR	KETERANGAN
		KTP KUNING/KK PINK	
		SKPD	
		PASPOR	
2022	96	BUKU NIKAH	DITERUSKAN KE
		KETERANGAN KELAHIRAN	DISDUKCAPIL KAB.
		IJAZAH	NUNUKAN
	1	TANPA DASAR	
Jumlah	97		
2023	43	KTP KUNING/KK PINK	

---

	SKPD
	PASPOR
	BUKU NIKAH
	KETERANGAN KELAHIRAN
	IJAZAH
	0 TANPA DASAR
Jumlah	43 (Data per September 2023)
Total	139

---

Sumber: Buku Register Permohonan NIK baru Kecamatan Sebatik Tengah

## Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan NIK Melalui Pemutakhiran Data Kependudukan

### Ketepatan Sasaran Program

Pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui program pelayanan penerbitan NIK di Kecamatan Sebatik Tengah telah dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan yang meliputi 4 (empat) desa yaitu Desa Aji Kuning, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul dan Desa Sungai Limau. Dimensi ketepatan sasaran pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan ini dapat dilihat dari jangkauan atau cakupan sasaran pelayanan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sebatik Tengah. Secara kualitatif, ketepatan sasaran sudah sangat baik. Pelayanan ini dilaksanakan di wilayah Desa yang ada di Kecamatan Sebatik Tengah terhadap warga yang belum memiliki NIK namun sudah berdomisili di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

Sedangkan secara kuantitatif, sasaran pelayanan ini cukup baik pada saat pemutakhiran dilaksanakan di tahun 2018 sebanyak 251 warga yang mengajukan permohonan penerbitan NIK berdasarkan hasil rekapitulasi yang Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Tengah. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini masih ada permohonan penerbitan NIK oleh warga yang berusia 5 tahun keatas bahkan menginjak lanjut usia yang jumlah setiap tahun hampir mencapai 100 orang berdasarkan buku register penerbitan NIK (usia 5 tahun keatas) Kecamatan Sebatik Tengah.

### Sosialisasi Program

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Sebatik Tengah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan bagi warga yang berusia 5 tahun keatas masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa melalui Kepala Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan bahwa sosialisasi maupun penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan hanya sebatas pada koordinasi dan penyampaian sekilas pada pertemuan di desa. Pihak kecamatan sama sekali tidak melakukan sosialisasi secara khusus. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Camat Sebatik Tengah yang menyampaikan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pemberitahuan melalui pemerintah desa sedangkan untuk

penyampaian ke warga secara langsung hanya dilakukan ketika ada rapat didesa. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan personal kecamatan seperti yang dijelaskan oleh Camat Sebatik Tengah.

## **Pencapaian Tujuan**

Dimensi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program dengan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang dicapai atau diperoleh. Tujuan pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan khususnya bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan keatas di Kecamatan Sebatik Tengah yang diharapkan adalah tidak ada lagi warga yang tidak memiliki NIK. Hal ini menjadi penting sehingga setia WNI yang berdomisili di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan termasuk bantuan sosial.

Hubungan delegatif yang disebutkan oleh Paul Hersey dan Kenneth dalam konsep dasar kepemimpinan situasional turut menjadi salah satu dasar Kecamatan Sebatik Tengah melakukan pelayanan ini. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat bahwa Camat memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Hal ini turut menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah sebagai upaya optimalisasi pelayanan dasar khususnya kewajiban kepemilikan NIK bagi setiap WNI. Pencapaian 251 di tahun 2018 warga yang pada awalnya tidak memiliki NIK akhirnya dapat menerima pelayanan sosial dasar lainnya setelah mendapatkan NIK yang dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP.

## **Pemantauan Program**

Dimensi pemantauan pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan Sebatik Tengah khususnya bagi warga yang telah berusia 5 tahun keatas telah dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat baik dari pihak kecamatan maupun desa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Camat adalah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif baik kepada pemerintah desa maupun Masyarakat. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Tengah juga terus melakukan pemantauan dengan terjun langsung ke masing-masing desa untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dokumen dan verifikasi awal berjalan dengan baik.

Kegiatan pengendalian/pengawasan menurut Robbins dan Coulter perlu dilakukan dengan benar agar tujuan organisasi yang terdistribusi dalam bentuk program dan kegiatan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan demikian, kegiatan pemantauan yang dilakukan baik oleh Camat, pemerintah desa bahkan masyarakat harus disertai dengan evaluasi program sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diatasi segera dan tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Selain itu, dijelaskan oleh Camat, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, diperlukan keterlibatan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan para mantan TKI yang tidak memiliki administrasi kependudukan ketika kembali ke Indonesia. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan peran pemerintah pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan biodata penduduk dilakukan terhadap WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah atau kembali ke Indonesia. Lebih lanjut ditegaskan pula pada ayat (2) pasal yang sama bahwa pencatatan biodata penduduk juga dilakukan terhadap WNI di luar wilayah NKRI.

Langkah inilah yang perlu dilakukan agar data penduduk terutama para TKI yang terlalu lama berdomisili di luar negeri dapat dikumpulkan dan diterbitkan Nomor Induk khusus WNI yang berada di luar negara. Langkah ini pada dasarnya telah tercantum dalam pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “ Untuk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki nomor identitas tunggal wajib melapor ke Perwakilan Republik Indonesia”. Dengan demikian, permasalahan warga khususnya para mantan TKI yang tidak memiliki NIK ketika pulang ke Indonesia dapat segera teratasi.

## **Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data Kependudukan**

Pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan bagi warga yang telah berusia 5 tahun 3 bulan ke atas di Kecamatan Sebatik Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan program sehingga dapat dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukan program ini. Faktor-faktor ini dikemukakan oleh para informan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta didukung melalui hasil dokumentasi dan studi literatur yang diuraikan sebagai berikut:

## **Faktor Pendorong Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan**

- 1) Kolaborasi antar *stakeholder* (kecamatan, pemerintah desa, sekolah, puskesmas dan tokoh Masyarakat) cukup baik sehingga setiap kendala yang ditemui di lapangan dapat segera di koordinasikan dan dikonsultasikan untuk diselesaikan;
- 2) Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan melalui kegiatan PATEN. Hal ini memberikan kewenangan kepada Camat untuk Menyusun program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pelayanan kependudukan salah satunya

pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan khususnya bagi warga yang berusia diatas 5 tahun 3 bulan.

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan NIK melalui program pemutakhiran data kependudukan**

- 1) Anggaran kecamatan yang terbatas pada pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara umum. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tidak disertai dengan penambahan anggaran. dan penguatan kualitas dan kuantitas personil Kecamatan Sebatik Tengah.
- 2) Kurangnya kualitas SDM terutama pada petugas verifikasi berkas permohonan baik di tingkat Desa maupun Kecamatan. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tidak disertai penguatan kualitas dan kuantitas personil Kecamatan Sebatik Tengah. Pelatihan bagi petugas pelayanan dan verifikator masih sangat minim bahkan hampir tidak ada dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Jumlah aparatur kecamatan sangat minim terutama pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang hanya terdiri dari 1 orang PNS (bertindak sebagai Kepala Seksi sekaligus Petugas Verifikasi) dan didukung oleh 2 orang honorer yang merupakan petugas pelayanan (*front office*)
- 4) Adanya dokumen permohonan yang tidak lengkap terutama masih banyak warga yang tidak memiliki dokumen dasar yang dapat membuktikan bahwa warga tersebut merupakan WNI. Hambatan ini muncul dikarenakan banyaknya penduduk mantan TKI yang memilih berdomisili di Kecamatan Sebatik Tengah setelah Kembali ke Indonesia namun tidak pernah mengurus dokumen kependudukan sebagai TKI.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan keatas masih belum efektif. Hal ini didasarkan pada hasil analisis melalui dimensi efektivitas yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dimensi ketepatan sasaran program ini sudah sangat baik menjangkau seluruh Desa yang ada diwilayah Kecamatan Sebatik Tengah namun pada ketiga dimensi lainnya masih belum maksimal. Selain itu, Pelaksanaan pelayanan penerbitan NIK melalui pemutakhiran data kependudukan bagi warga yang berusia 5 tahun 3 bulan ke atas didukung oleh peran serta para *stakeholder* yang berada di kecamatan Sebatik Tengah seperti pihak puskesmas, sekolah dan pemerintah desa termasuk tokoh Masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program ini yaitu anggaran dan personil kecamatan yang masih kurang, kualitas aparatur desa selaku tim verifikator desa juga masih kurang. Kendala atau

hambatan pelaksanaan program juga berasal dari masyarakat sebagai sasaran program. Masih terdapat warga yang tidak memiliki dokumen dasar sama sekali yang dapat membuktikan bahwa warga tersebut merupakan WNI.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Manajemen 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia (Ed. Pertama). Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2013. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta : Kencana.
- Budiani, N.W. 2007. Efektivitas Progam Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Volume 2 Nomor 1 :49-57
- Budiman dan Barlian, U.C. 2020. Manajemen Strategik (Edisi Pertama). Bandung. Putrana Jaya Mandiri
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Ketiga Cetakan Ke-9). Jakarta. Kencana
- Fachriansyah. 2011. Efektifitas Organisasi Pendapatan dan Aset Kabupaten Bangka Barat. Jakarta. Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka
- Gatiningsih dan Sutrisno, E.2017. Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Jatinangor: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN
- Gibson, dkk.1984. Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses. (Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga
- Greaves, B.B. (Eds).(2007). Bureaucracy. Indiana:Liberty Fund, Inc.
- Hamdi, M. dan Siti. I. 2021. Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka
- Haning, Mohammad Thahir. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) Vol. 4 No. 1. Universitas Hasnuddin. Makassar. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/5902>
- Jones, Charles.O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. (Terjemahan : Ricky Istamto). Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Malik, Ali Abdul. 2017. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIs) Nomor 14 Volume 01 Hal. 53-59. Diakses dari <http://103.88.229.8/index.php/TAPIs/article/view/1619>
- Masfi, Ahmad. 2018. Analisis Efektifitas Organisasi dengan Pendekatan Model Mc Kinsey 7S Framework Terhadap Knerja Puskesmas di Kabupaten Sampang. Tesis Universitas Airlangga. Diakses dari [https://repository.unair.ac.id/77019/2/TKP%2026\\_18%20Mas%20a.pdf](https://repository.unair.ac.id/77019/2/TKP%2026_18%20Mas%20a.pdf)

- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Ombusman Republik Indonesia. 2023. Pelayanan Publik Kita Masih Buruk. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-kita-masih-buruk>
- Radar Kaltara. 2023. "Warga Perbatasan Banyak Belum Memiliki e-KTP. Dikutip dari <https://kaltara.prokal.co/read/news/9218-warga-perbatasan-banyak-belum-miliki-e-ktp.html>
- Rahmadana, M.F et al. 2020. Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis
- Setiawan, Irfan. 2020. Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara (Tinjauan Teoritik, Normatif dan Implementatif). Bandung. Rtujuh Mediaprinting
- Siagian, Sondang P. 2006. Sistem Informasi. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 1999. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press hal. 23
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit. Citra Utama
- Suwitri, S. 2014. Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Tangerang Selatan. Universitas Terbuka
- Suwitri, S. et al. 2019. Teori Administrasi (Edisi Kedua).Tangerang Selatan:Universitas Terbuka.
- Taufiqurokhman & Satispi, E. 2018. Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan. UMJ PRESS
- Tefa, G. dan Nrhidaya, J. 2018. Efektifitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Jurnal DUKCAPIL Volume 6 Nomor 2 hal. 161-188. Diakses dari <file:///D:/FILE%20KULIAH%20UT%20S2/PROPOSAL/Proposal%20Penelitian%20Lengkap/penelitian%20terdahulu/JURNAL%20ADM%20KEP%20IPDN.pdf>
- Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya. 1984. Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta. PT Gunung Agung
- Verawati, A.T, Syamsiar dan Aminah, S. 2022. Efektifitas Pengelolaan Pelayanan dalam Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau :Public Administration Volume 3 Nomor 1 hal. 913-921. Diakses dari <file:///D:/FILE%20KULIAH%20UT%20S2/PROPOSAL/Proposal%20Penelitian%20Lengkap/penelitian%20terdahulu/TESIS%202.pdf>

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

Volume 6 Nomor 6 (2024) 3187 – 3199 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i6.2644

Zulfikar, Fahri.2021. 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>